



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Februari 2020
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
JALAN PRAMUKA RAYA NO.9 BELANTI PADANG
TELEPON 0751 443017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Februari 2019
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
NIP 19650504 199003 1 008

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp550 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 28.342.490.677 atau mencapai 82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 34.639.855.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.129.147.391 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.194.404.203; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.923.430.132; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp11.313.056.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.129.147.391 dan Rp6.126.964.788

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp70.785, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17.013.942.626 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp25.526.772.145. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus

Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp42.037.946 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp25.484.663.414.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp3.612.876.983 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp25.484.663.414 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.998.751.219 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp6.126.964.788.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	29,545,285	0.00	550
JUMLAH PENDAPATAN		-	29,545,285	0.00	550
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5,189,815,000	4,876,958,097	93.97	4,762,151,507
Belanja Barang	B.4	27,190,509,000	21,454,039,457	78.90	12,833,262,035
Belanja Modal	B.5	794,531,000	759,830,000	95.63	896,702,210
Belanja Hibah	B.6	1,465,000,000	1,251,663,123		
JUMLAH BELANJA		34,639,855,000	28,342,490,677	81.82	18,492,115,752

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2,194,404,203	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	753
Jumlah Aset Lancar		2,194,404,203	753
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2,105,730,000	2,105,730,000
Peralatan dan Mesin	C.15	3,763,204,640	3,033,374,640
Gedung dan Bangunan	C.16	365,080,000	335,080,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2,310,584,508)	(1,863,941,114)
Jumlah Aset Tetap		3,923,430,132	3,610,243,526
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	350,000	350,000
Aset Lain-Lain	C.22	296,037,334	296,037,334
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(285,074,278)	(283,370,943)
Jumlah Aset Lainnya		11,313,056	13,016,391
JUMLAH ASET		6,129,147,391	3,623,260,670
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	2,182,603	10,383,687
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,182,603	10,383,687
JUMLAH KEWAJIBAN		2,182,603	10,383,687
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	6,126,964,788	3,612,876,983
JUMLAH EKUITAS		6,126,964,788	3,612,876,983
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,129,147,391	3,623,260,670

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	70,785	500
JUMLAH PENDAPATAN		70,785	500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,876,958,097	4,762,151,507
Beban Persediaan	D.3	386,870,278	539,110,030
Beban Barang dan Jasa	D.4	14,264,242,195	5,757,360,785
Beban Pemeliharaan	D.5	379,496,640	197,260,381
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5,170,858,206	5,397,901,401
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	448,346,729	360,158,522
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		25,526,772,145	17,013,942,626
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(25,526,701,360)	(17,013,942,126)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		9,563,000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	(1,225,776,283)
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		32,474,946	9,912,741
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		42,037,946	(1,215,863,542)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(25,484,663,414)	(18,229,805,668)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	3,612,876,983	4,254,632,614
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(25,484,663,414)	(18,229,805,668)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	35,445,000
JUMLAH		-	35,445,000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27,998,751,219	17,552,605,037
EKUITAS AKHIR	E.5	6,126,964,788	3,612,876,983

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum sebagai sebagai suatu lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(1) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(2) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);;
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara

lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(3) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	4,317,027,000	5,189,815,000
Belanja Barang	26,663,222,000	27,190,509,000
Belanja Modal	15,000,000	794,531,000
Belanja Hibah	-	1,465,000,000
Jumlah Belanja	30,995,249,000	34,639,855,000

Realisasi

Pendapatan

Rp29.545.285

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.545.285 atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan penjualan dan pengelolaan BMN sebesar Rp. 9.563.000, pendapatan jasa lembaga keuangan(jasa giro) sebesar Rp. 70.785 dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp19.911.500 :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	29,545,285	-
Jumlah	-	29,545,285	-

Realisasi Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 354.55% dikarenakan adanya pendapatan lain-lain dari kelebihan setoran UP sebesar Rp.500.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0.00
Pendapatan Lain-lain	29,545,285	550	5371770.00
Jumlah	29,545,285	550	5371770.00

Realisasi

*Belanja Negara
Rp28.342.490.6
77*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp28.342.490.677 atau 81.82% dari anggaran belanja sebesar Rp34.639.855.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,189,815,000	4,876,960,488	93.97
Belanja Barang	28,655,509,000	22,710,799,679	79.25
Belanja Modal	794,531,000	759,830,000	95.63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	34,639,855,000	28,347,590,167	81.84
Pengembalian		5,099,490	-
Jumlah	34,639,855,000	28,342,490,677	81.82

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 53,27% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pilpres 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,876,958,097	4,762,151,507	2.41
Belanja Barang	22,705,702,580	12,833,262,035	76.93
Belanja Modal	759,830,000	896,702,210	(15.26)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	28,342,490,677	18,492,115,752	53.27

Belanja

Pegawai

Rp4.876.958.0

97

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.876.958.097 dan Rp4.762.151.507. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,72 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Pembayaran kenaikan besaran THR PNS Tahun 2018
2. Kenaikan Pangkat Regular dan kenaikan gaji berkala beberapa PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,849,500,650	1,677,787,042	10.23
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	3,027,459,838	3,104,932,710	(2.50)
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi			-
Jumlah Belanja Kotor	4,876,960,488	4,782,719,752	1.97
Pengembalian Belanja Pegawai	(2,391)	(20,568,245)	1,847,900
Jumlah Belanja	4,876,958,097	4,762,151,507	2.41

Belanja

Barang

Rp22.710.799.679

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.710.799.679 dan Rp12.833.262.035. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 76.93% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja jasa, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri di tahun 2019, karena pada tahun 2019 dilaksanakannya tahapan Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	526,480,500	389,878,980	35.04
Belanja Barang Non Operasional	3,176,385,330	3,548,656,280	(10.49)
Belanja Jasa	10,571,820,854	1,833,370,733	476.63
Belanja Pemeliharaan	379,400,640	195,906,381	93.66
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,173,587,206	5,402,346,401	(4.23)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,883,125,149	1,468,098,260	96.39
Jumlah Belanja Kotor	22,710,799,679	12,838,257,035	76.90
Pengembalian Belanja	(5,079,099)	(4,995,000)	
Jumlah Belanja	22,705,720,580	12,833,262,035	76.93

Belanja Modal

Rp759.830.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp759.830.000 dan Rp896.702.210. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 15.26% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fasilitas peralatan dan mesin terkait dengan dilaksanakannya Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729,830,000	873,007,210	(16.40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,000,000	23,695,000	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	759,830,000	896,702,210	-15.26
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	759,830,000	896,702,210	-15.26

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar nol persen dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp 729.830.000 mengalami kenaikan sebesar 9,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 873.007.210. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	421,830,000	598,700,000	-29.54
Laptpo			
Peralatan Lainnya	308,000,000	223,415,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	729,830,000	822,115,000	-11.23
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	729,830,000	822,115,000	-11.23

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	30,000,000	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	30,000,000	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	30,000,000	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0.00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan
2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan
2018*

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp2.194.404.2
03*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2019 dan 2018

Uraian	TH 2019	TH 2018
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2019 dan 2018

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2019 dan 2018

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Piutang Tak Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2019 dan 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja

Dibayar di

Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2019 dan
2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 753,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018

Persediaan	Tahun 2019	Tahun 2018
Barang konsumsi	-	753
<i>Bahan Baku</i>	-	0
<i>Jumlah</i>	-	753

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2019 dan 2018

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2019 dan 2018

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
3	xxx	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp 2.105.730.00

0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 2.105.730.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2019	2.105.730.000
Mutasi tambah:	0
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2019	2.105.730.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2019

No	Luas (m2)	Lokasi	Nilai
1	2127	Kel. Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang	2.105.730.000
Jumlah			2.105.730.000

Peralatan dan Mesin **C.15 Peralatan dan Mesin**
3.763.204.640

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 3.003.374.640. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	3.033.374.640
Mutasi tambah:	
Pembelian	729.830.000
Hibah Barang	
Perolehan lainnya	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	3.763.204.640
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	2.291.225.280
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.471.979.360

Terdapat mutasi tambah melalui pembelian pada Semester 2 TA 2019 berupa peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	308.000.000	308.000.000
2.	Lemari Kayu Modera	3 Unit	1.600.000	4.800.000
3.	Lemari Display RPP	1 Unit	13.100.000	13.100.000
4.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	4.400.000	4.400.000
5.	LCD Projector/Infocus	1 Unit	7.800.000	7.800.000
6.	Focusing Screen/LCD Projector	1 Unit	1.500.000	1.500.000
7.	A.C Split	1 Unit	8.420.000	8.420.000
	A.C Split	1 Unit	5.285.000	5.285.000
	A.C Split	1 Unit	4.990.000	4.990.000
8.	Televisi	6 Unit	3.760.000	22.560.000
9.	Loudspeaker	1 Unit	3.500.000	3.500.000
10.	Tripod Camera	1 Unit	1.450.000	1.450.000

11.	P.C Unit	6 Unit	11.200.000	67.200.000
	P.C Unit	5 Unit	14.800.000	74.000.000
12.	Note Book	3 Unit	13.450.000	40.350.000
13.	Tablet PC	1 Unit	4.400.000	4.400.000
14.	Komputer Unit Lainnya (RPP)	1 Unit	53.000.000	53.000.000
	Komputer Unit Lainnya (RPP)	1 Unit	64.000.000	64.000.000
15.	Printer	2 Unit	1.500.000	3.000.000
	Printer	2 Unit	5.500.000	11.000.000
	Printer	3 Unit	4.025.000	12.075.000
16.	Scanner	1 Unit	15.000.000	15.000.000
Total				729.830.000

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang terdapat dalam neraca sebesar Rp 296.037.334,. Total keseluruhan lelang aset BMN yang rusak berat yang terdapat dalam aplikasi SIMAK BMN senilai Rp 299.996.334,. dan telah dilakukan lelang oleh KPKNL Padang dengan nomor risalah lelang 616/08/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan nilai limit sebesar RP 1.970.000,. dan nilai penawaran lelang sebesar Rp 4.320.000,. Namun sampai laporan ini dibuat SK persetujuan untuk penghapusan dari SIMAK BMN belum keluar dari KPU RI sehingga masih terdapat dalam neraca.

*Gedung dan
Bangunan
365.080.000*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 365.080.000 dan Rp. 335.080.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	335.080.000
Mutasi tambah:	30.000.000
Revaluasi BMN	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	365.080.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(19.359.228)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	345.720.772

Terdapat mutasi tambah atas gedung dan bangunan pada tahun 2019 berupa pengembangan secara langsung Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah

maupun kurang atas aset tetap ini untuk TA 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Pada tanggal 19 Desember 2019 telah dilakukan lelang oleh KPKNL Padang dengan nomor risalah 802/08/2019 terhadap KDP yang telah dihentikan penggunaannya secara permanen dengan nilai limit Rp 4.943.000,. dan nilai penawaran lelang sebesar Rp 5.243.000,.

Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
2.310.584.508*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 2.310.584.508,- dan Rp 1.863.941.114,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.763.204.640	2.291.225.280	1.471.979.360
2	Gedung dan Bangunan	365.080.000	19.359.228	345.720.772
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		4.128.284.640	2.310.584.508	1.817.700.132

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp350.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp350.000,- dan Rp 350.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset Tak Berwujud pada KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan anti virus yang diadakan satu paket dengan

komputer dan printer untuk pengelolaan data kepegawaian tahun 2011. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	350.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	350.000
Akumulasi Amortisasi s.d.31 Desember 2019	(350.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

Aset Lain-Lain

Rp

296.037.334

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 296.037.334 dan Rp 296.037.334. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	296.037.334
Mutasi tambah:	
Aset tetap tidak digunakan	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2019	296.037.334
Akumulasi Penyusutan	283.872.611
Nilai Buku per 31 Desember 2019	12.164.723

Transaksi penambahan aset lain-lain adalah penambahan dari aset tetap yang tidak digunakan karena rusak berat senilai Rp. 0,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
285.074.278*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 285.074.278,- dan Rp 283.872.611,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	350.000	350.000	0
Jumlah	350.000	350.000	0
Aset Lain-lain	296.037.334	284.724.278	11.313.056
Jumlah	296.387.334	285.074.278	11.313.056

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp2.182.603*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.182.603 dan Rp10.363.687 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang pada Pihak Ketiga (Barang)	1,687,303	Jasa giro yang belum disetor
Utang pada Pihak Ketiga (PDAM)	495,300	Belanja jasa air bulan Desember
Jumlah	2,182,603	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Masih Harus
Dibayar Rp0*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2019 dan TA 2018*

Uraian	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp6.126.964.788

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.126.964.788 dan Rp3.612.876.983. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP*

Rp70.785

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp70.785 dan Rp500,-

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	70,785	500	0
Jumlah	70,785	500	0

Beban

Pegawai

*Rp4.876.958.0
97*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.876.958.097 dan Rp4.762.151.507. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,849,498,259	1,677,492,167	10
Beban Tunjangan-tunjangan	3,027,459,838	3,084,659,340	(2)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	4,876,958,097	4,762,151,507	2

*Beban
Persediaan
Rp386.870.278*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp386.870.278 dan Rp539.110.030. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	261,469,525	228,262,030	15
Persediaan bahan baku	125,400,753	310,848,000	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	386,870,278	539,110,030	(28)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp14.264.242.
195*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.264.242.195 dan Rp5.757.360.785. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	309,826,000	209,643,480	47.79
Beban Pengiriman surat dinas pos	2,614,500	2,145,500	21.86
Beban Honor Operasional Satker	184,890,000	160,600,000	15.12
Beban Barang Operasional Lainnya	29,150,000	17,490,000	66.67
Beban Bahan	1,315,512,220	1,276,990,780	3.02
Beban Honor Output Kegiatan	859,150,000	1,587,452,500	(45.88)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,001,723,110	683,963,000	46.46
Beban Langganan Listrik	179,195,748	145,265,474	23.36
Beban Langganan Telepon	20,709,378	27,069,100	(23.49)
Beban Langganan Air	5,658,600	5,317,900	6.41
Beban Jasa Pos dan Giro	0	2,250,000	(100.00)
Beban Jasa Konsultan	7,619,500,000	0	
Beban Sewa	129,743,250	201,691,051	(35.67)
Beban Jasa Profesi	129,700,000	97,450,000	33.09
Beban Jasa Lainnya	2,476,869,389	1,340,032,000	84.84
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Jumlah	14,264,242,195	5,757,360,785	147.76

*Beban
Pemeliharaan
Rp379.496.64
0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 379.496.640 dan Rp197.260.381. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91,554,000	67,635,150	35.36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,846,640	128,271,231	124.40
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	96,000	1,354,000	(92.91)
Jumlah	379,496,640	197,260,381	92.38

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp5.170.858.206

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.170.858.206 dan Rp5.397.901.401. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,625,248,580	2,084,299,860	25.95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	70,010,000	171,050,000	-59.07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,892,882,500	1,939,928,614	-2.43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	582,717,126	1,202,622,927	-51.55
Jumlah	5,170,858,206	5,397,901,401	-4.21

Beban Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp448.346.729

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp448.346.729 dan Rp360.158.522. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah

sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	438,572,626	350,745,865	25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,070,768	7,709,322	5
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,703,335	1,703,335	-
Jumlah Penyusutan	448,346,729	360,158,522	24
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	448,346,729	360,158,522	24

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp42.037.946*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan

2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	0	50	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang lalu	19,911,500	0	#DIV/0!
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	9,563,000	(1,225,776,283)	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	15,390,000	12,927,140	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(2,826,554)	(3,014,399)	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	42,037,946	(1,215,863,492)	(103.46)

*)

Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.612.876.983

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.612.876.983 dan Rp4.254.632.614.

Defisit LO
Rp25.484.663.414
4

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp25.484.663.414 dan Rp18.229.805.668. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0 Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker KPU Provinsi Sumatera Barat.

Koreksi Aset

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-

Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp35.445.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas

hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp27.998.751.21

9

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.998.751.219 dan Rp Rp17.552.605.037 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(29,545,285)
Ditagihkan ke Entitas Lain	27,090,827,554
Transfer Masuk	9,087,000
Transfer Keluar	(2,515,998,073)
Pengesahan Hibah Langsung	3,500,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(55,619,977)
Jumlah	27,998,751,219

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(29.545.285) sedangkan DKEL sebesar Rp27.090.827.554,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	-
2	Persediaan	Rp -	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 201 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemda Sumbar	Uang	Rp 3,500,000,000
Total Pengesahan			Rp 3,500,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 55,619,977
Jumlah			Rp 3,444,380,023

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp6.126.964.788

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.126.964.788 dan Rp3.612.876.983

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2018.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. KPU Provinsi Sumatera Barat

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, berikut ini proses dan implementasi hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 131.000.000.000,- (Seratus Tiga Pulu Satu Milyar Rupiah).

Pemberian hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 131.000.000.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 903/1999/Angg/B.Keuda-2019 dan Nomor 903/PR.07-NK/X/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019 senilai Rp. 131.000.000.000,-.

2. KPU Provinsi Sumatera Barat membuka rekening hibah sebagaimana surat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Padang Nomor S-2154/WPB.03/KP.010/2019 tanggal 8 November 2019 Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nama rekening dana hibah KPU Provinsi Sumatera Barat “RPL 010 PDHL KPU PROV SUMBAR UTK 2V6745VA ”. Rekening dibuka pada Bank BNI Cabang Padang dengan Nomor Rekening “ 0877316494”.

3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sehingga KPU Kabupaten/Kota wajib mengangkat bendahara pengeluaran pembantu yang akan mengelola dana hibah yang ditransfer oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Persetujuan rekening untuk KPU Kabupaten/ Kota sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dikeluarkan oleh Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara Padang melalui surat Nomor S-429/WPB.03/KP.010/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini nama rekening penampungan dana hibah untuk KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
4. Register hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah diterbitkan oleh Kanwil DJPN Sumatera Barat melalui Surat Nomor S-1944/WPB.03/2019 tanggal 4 November 2019 dengan nomor register 2V6745VA.
5. Dana Hibah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera

Barat dalam Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000:

6. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi hibah ke DIPA APBN Tahun anggaran 2019 melalui Revisi ke 04 DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.654301/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 465.000.000,- yang terdiri dari 2 (dua) akun yaitu honor output kegiatan (521213) sebesar Rp. 215.000.000,-, dan belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 250.000.000,-
7. Pengesahan hibah ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00462/654301/KPU-SB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Belanja terdiri dari honor output kegiatan (521213) sebesar Rp. 67.800.000,-, dan belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 239.483.100,-.

Hibah Operasional KPU Prov Sumbar Tahun 2019

Berkaitan dengan Supervisi, Monitoring dan asistensi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Pilkada Tahun 2020 , berikut ini proses dan implementasi hibah dalam rangka Hibah Operasional Tahun 2019, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan Supervisi, Monitoring dan asistensi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Pilkada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pemberian hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.000.000.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 120/036/Pen-2019/ dan Nomor 88/KU.03.2/13/Sek-Pov/I/2020 pada tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,-.

2. KPU Provinsi Sumatera Barat membuka rekening hibah sebagaimana surat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Nomor S-280/WPB.03/KP.010/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nama rekening dana hibah KPU Provinsi Sumatera Barat “RPL 010 PDHL KPU PROV SUMBAR UTK 2VXDDSSA”.
3. Register hibah untuk penyelenggaraan Supervisi, Monitoring dan asistensi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Pilkada Tahun 2020 telah diterbitkan oleh Kanwil DJPN Sumatera Barat melalui Surat Nomor S-165/WPB.03/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan nomor register 2VXDDSSA.
4. Dana Hibah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000:
5. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi hibah ke DIPA APBN Tahun anggaran 2019 melalui Revisi ke 04 DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.654301/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari 4 (empat) akun yaitu belanja bahan (5212111) sebesar

Rp. 17.178.000, belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) sebesar Rp. 10.000.000,-, dan belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 592.822.000,-, dan belanja perjalanan biasa (524111) sebesar Rp. 380.000.000,-

6. Pengesahan hibah ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00347/654301/KPU-SB/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Belanja Nomor 463/654301/KPU-SB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari belanja bahan (521211) sebesar Rp. 14.299.250,-, belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 579.236.010,-, belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) sebesar Rp. 9.877.000,-, dan dan belanja perjalanan biasa (524111) sebesar Rp. 340.967.763,-

7. Pengembalian sisa dana hibah operasional melalui Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) Nomor 00464/654301/KPU-SB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 55.619.977,-. Semua sisa anggaran telah dikembalikan ke kas daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 2019.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.2-Kpt/Sek-Prov/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukkan

Pengelola Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Firman, SH.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jumiati, S.Ip
Pejabat PPSPM	: Yurika Amalia, SE
Bendahara	: Ricki Setiawan, A.Md

Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
NIP. 196505041990031008

Lampiran I: Penyusutan Aset Tetap

KOMISI PEMILIHAN UMUM SATKER PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
	Jumlah		2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
B	Peralatan dan Mesin						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	663.750.000	360.000.000	21.696.429	381.696.429	282.053.571
5	Alat Kantor	101	334.219.350	201.935.450	37.508.640	239.444.090	94.775.260
6	Alat Rumah Tangga	125	607.500.230	242.876.108	75.639.951	318.516.059	288.984.171
7	Alat Studio	13	89.645.850	55.054.285	9.977.870	65.032.155	24.613.695
8	Alat Komunikasi	4	8.332.000	7.832.000	500.000	8.332.000	-
9	Peralatan Pemancar	1	350.000	245.000	35.000	280.000	70.000
10	Peralatan Komunikasi Navigasi	2	2.000.000	599.994	133.334	733.328	1.266.672
11	Alat Kesehatan Umum	1	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
13	Unit Alat Laboratorium	10	54.941.270	9.777.429	3.662.751	13.440.180	41.501.090
18	Komputer Unit	42	708.976.350	315.772.786	91.757.517	407.530.303	301.446.047
19	Peralatan Komputer	50	553.909.590	302.563.737	109.334.373	411.898.110	142.011.480
22	Alat peraga pelatihan dan percontohan	1	5.000.000	500.000	500.000	1.000.000	4.000.000
	Jumlah		3.033.374.640	1.501.906.789	350.745.865	1.852.652.654	1.180.721.986
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	335.080.000	3.579.138	7.709.322	11.288.460	323.791.540
	Jumlah		335.080.000	3.579.138	7.709.322	11.288.460	323.791.540
D	Aset Tetap Yang Tidak						
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	120	294.844.284	281.317.608	1.703.335	283.020.943	11.823.341
	Jumlah		294.844.284	281.317.608	1.703.335	283.020.943	11.823.341
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Software	1	350.000	-	-	350.000	-
	Jumlah		350.000	-	-	350.000	-
	Total		5.769.378.924	1.505.485.927	358.455.187	1.864.291.114	3.610.243.526

Lampiran I: Penyusutan Aset Tetap

KOMISI PEMILIHAN UMUM SATKER PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
	Jumlah		2.105.730.000	-	-	-	2.105.730.000
B	Peralatan dan Mesin						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	663.750.000	360.000.000	21.696.429	381.696.429	282.053.571
5	Alat Kantor	101	334.219.350	201.935.450	37.508.640	239.444.090	94.775.260
6	Alat Rumah Tangga	125	607.500.230	242.876.108	75.639.951	318.516.059	288.984.171
7	Alat Studio	13	89.645.850	55.054.285	9.977.870	65.032.155	24.613.695
8	Alat Komunikasi	4	8.332.000	7.832.000	500.000	8.332.000	-
9	Peralatan Pemancar	1	350.000	245.000	35.000	280.000	70.000
10	Peralatan Komunikasi Navigasi	2	2.000.000	599.994	133.334	733.328	1.266.672
11	Alat Kesehatan Umum	1	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
13	Unit Alat Laboratorium	10	54.941.270	9.777.429	3.662.751	13.440.180	41.501.090
18	Komputer Unit	42	708.976.350	315.772.786	91.757.517	407.530.303	301.446.047
19	Peralatan Komputer	50	553.909.590	302.563.737	109.334.373	411.898.110	142.011.480
22	Alat peraga pelatihan dan percontohan	1	5.000.000	500.000	500.000	1.000.000	4.000.000
	Jumlah		3.033.374.640	1.501.906.789	350.745.865	1.852.652.654	1.180.721.986
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	335.080.000	3.579.138	7.709.322	11.288.460	323.791.540
	Jumlah		335.080.000	3.579.138	7.709.322	11.288.460	323.791.540
D	Aset Tetap Yang Tidak						
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	120	294.844.284	281.317.608	1.703.335	283.020.943	11.823.341
	Jumlah		294.844.284	281.317.608	1.703.335	283.020.943	11.823.341
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Software	1	350.000	-	-	350.000	-
	Jumlah		350.000	-	-	350.000	-
	Total		5.769.378.924	1.505.485.927	358.455.187	1.864.291.114	3.610.243.526

